

# EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN BESUSU TENGAH KECAMATAN PALU TIMUR KOTA PALU

Sunarti

*sunartinontji@yahoo.com*

*(Mahasiswa Program Studi magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako)*

## Abstract

*The research aimed to determine the effectiveness of the development in central Besusu village, East Palu sub-district, Palu. Effectiveness is an activity to achieve the goal by using available infrastructure and resources. Referrred to Rhicard M. Steers, to measure the effectiveness of development activities in the Village Council Central Besusu consists of three (3) aspects, including, Goals; Integration; and Adaptation. The research used a qualitative method of data analysis was the qualitative analysis model. There were 7 informants selected by technique purposive sampling. The results of the research indicated that the effectiveness of musrenbang implementation in central Besusu Village, quite effective. However, the achievement of the objective aspect, there were some suggestions less accommodated, in the process of musrenbang implementation can be stated that it was worst towards the musrenbang goal itself. While the two (2) other aspects that intergation and adaptation, has been running well based on the list of priority program activities of Development Planning Meeting in the Village Central Besusu in 2014.*

**Keywords:** *Musrenbang, Village, and Society.*

Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) pada hakikatnya adalah forum perencanaan pembangunan formal yang berusaha mempertemukan aspirasi masyarakat dari bawah dengan usulan program pembangunan dari instansi pemerintah. Dalam praktiknya, forum Musrenbang memiliki sejumlah kelebihan dan kekurangan. Buruknya, salah satu bentuk konflik yang muncul adalah model perencanaan ini tidaklah mampu memuaskan semua pihak. Hal itu dikarenakan sejak awal desain Musrenbang masih kental dengan nuansa sentralistis (*top down planning*) yang antara lain ditandai dengan penyeragaman (*uniformity*) pendekatan perencanaan di pusat dan daerah, disiplin waktu pelaksanaan Musrenbang yang kaku dan cenderung dipaksakan, dan ketergantungan daerah terhadap alokasi anggaran dan program pemerintah pusat masih cukup tinggi.

Ditetapkannya Undang – Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)

mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan mendasar bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional yang semula bersifat Top Down Planning menjadi Bottom Up Planning yang menekankan pada penjangkaran aspirasi masyarakat secara patisipatif, demokrasi, terarah, dan menyeluruh. Sedangkan dalam pasal 2 Undang – Undang No. 25 Tahun 2004 pelaksanaannya diharapkan memenuhi prinsip – prinsip Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi yaitu dengan pinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional.

Musrenbang Kelurahan adalah forum dialogis antara pemerintah dengan pemangku kepentingan dari suatu isu/persoalan, kebijakan, peraturan, atau program pembangunan yang sedang dibicarakan. Dalam musrenbangkel, pemerintah kelurahan

dan warga berembung dalam menyusun program tahunan kelurahannya. Musrenbang kelurahan menjadi media dialog dan penyepakatan penyusunan program dan kegiatan pembangunan di wilayah kelurahan, baik yang ditangani secara swadaya, melalui pos bantuan daerah, menjadi bagian Renja SKPD Kelurahan, maupun diajukan untuk ditangani oleh SKPD lain yang relevan.

Dalam penyelenggaraan Musrenbang ini sebenarnya adalah terjadinya pemaduan serasian antara pendekatan top down yang dimiliki oleh instansi sektoral dan pendekatan bottom yang diemban oleh instansi daerah berdasarkan usulan masyarakat melalui Musyawarah Pembangunan Kelurahan (Musbanglur) dan temu karya pembangunan. Dalam prakteknya forum lebih bersifat pemangkasan usulan atau keinginan masyarakat oleh instansi pemerintah di atasnya, dengan alasan prioritas dan ketersediaan dana, (Sudriamunawar, 2002:89-100).

Sebagai bagian penting dari proses perencanaan partisipatif, maka musrenbang perlu memiliki karakter, menurut Keputusan menteri dalam negeri Nomor : 050-187/Kep/Bangda/2007, tentang Pedoman Penilaian dan evaluasi pelaksanaan Penyelenggaraan (musrenbang) sebagai berikut:

1. Merupakan “*demand driven process*” artinya aspirasi dan kebutuhan peserta musrenbang berperan besar dalam menentukan keluaran hasil musrenbang.
2. Bersifat inklusif artinya musrenbang melibatkan dan memberikan kesempatan yang seluas – luasnya kepada semua *stakeholders* untuk menyampaikan masalahnya, mengidentifikasi posisinya, mengemukakan pandangannya, menentukan peranan dan kontribusinya dalam pencapaian hasil musrenbang.
3. Merupakan proses berkelanjutan artinya merupakan bagian integral dari proses penyusunan rencana daerah (RKPD).

4. Bersifat “*strategic thinking process*” artinya proses pembahasan dalam musrenbang distrukturkan, dipandu, dan difasilitasi mengikuti alur pemikiran strategis untuk menghasilkan keluaran nyata; menstimulasi diskusi yang bebas dan fokus, dimana solusi terhadap permasalahan dihasilkan dari proses diskusi dan negosiasi.
5. Bersifat partisipatif dimana hasil merupakan kesepakatan kolektif peserta.
6. Mengutamakan kerjasama dan menguatkan pemahaman atas isu dan permasalahan pembangunan daerah dan mengembangkan konsensus.
7. Bersifat resolusi konflik artinya mendorong pemahaman lebih baik dari peserta tentang perspektif dan toleransi atas kepentingan yang berbeda; memfasilitasi landasan bersama dan mengembangkan kemauan untuk menemukan solusi permasalahan yang menguntungkan semua pihak (*mutually acceptable solutions*).

Selain itu, tujuan Musrenbang Kelurahan yaitu, sebagai berikut:

1. Menyepakati prioritas kebutuhan dan kegiatan yang termasuk urusan pembangunan yang menjadi wewenang kelurahan yang menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja SKPD Kelurahan.
2. Prioritas kegiatan kelurahan yang akan dilaksanakan oleh warga kelurahan yang dibiayai melalui dana swadaya masyarakat dan dikoordinasikan oleh lembaga kemasyarakatan di kelurahan setempat.
3. Prioritas kegiatan kelurahan yang akan dilaksanakan kelurahan sendiri yang dibiayai melalui dana bantuan dari pemerintah daerah (kota)
4. Prioritas kegiatan pembangunan kelurahan yang akan diusulkan melalui musrenbang kecamatan untuk menjadi kegiatan pemerintah daerah dan dibiayai melalui APBD kota atau APBD propinsi.
5. Menyepakati Tim Delegasi kelurahan yang akan memaparkan persoalan daerah yang

ada di kelurahannya di forum musrenbang kecamatan untuk penyusunan program pemerintah daerah/SKPD tahun berikutnya.

Selain itu, *Output* (Keluaran) dari hasil Musrenbang Kelurahan adalah:

1. Daftar prioritas kegiatan urusan pembangunan untuk menyusun Rencana Kerja SKPD kelurahan;
2. Daftar prioritas kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan secara swadaya;
3. Daftar permasalahan prioritas yang akan diajukan ke musrenbang kecamatan
4. Daftar nama Tim Delegasi Kelurahan yang mengikuti musrenbang kecamatan
5. Berita acara musrenbang kelurahan

Dalam praktiknya Musrenbang Kelurahan Besusu Tengah memiliki sejumlah kekurangan, seperti:

1. Tidak mampu menjangkau seluruh isu strategis pada tataran lokal diwilayah Kelurahan Besusu Tengah;
2. Kinerja koordinasi antar lembaga Pemerintah Kelurahan dan masyarakat Kelurahan Besusu Tengah belum terpadu, konsisten dan konstruktif;
3. Belum adanya jaminan pengawalan atas partisipasi masyarakat hingga pengambilan keputusan, dan;
4. Sinkronisasi antara alokasi program pembangunan dan kebutuhan masyarakat tidak sepenuhnya terjamin.

Disamping itu, Musrenbang Kelurahan Besusu Tengah juga memiliki kelebihan antara lain:

1. Memberikan kepastian kerangka institusional bagi perencanaan komprehensif yang terpadu dan berjenjang di Kelurahan Besusu Tengah;
2. Meningkatkan sinergi dan koordinasi diantara perangkat pemerintah kota dan antara pusat serta daerah;
3. Memberikan peluang yang luas bagi partisipasi masyarakat Kelurahan Besusu Tengah, dan;

4. Meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya daerah khususnya di Kelurahan Besusu Tengah.

Dari pengamatan awal penulis di lapangan, bahwa efektifitas musrenbangkel di kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur masih kurang efektif. Hal ini ditunjukkan dengan masih rendahnya pencapaian tujuan musrenbangkel, rendahnya keterlibatan masyarakat, rendahnya penerimaan stakeholder Yang termanifestasi dalam penurunan partisipan musrenbang. Pelaksanaan musrenbangkel kurang efektif hal ini dapat dilihat dari hasil serapan musrenbangkel di kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur pada APBD hanya beberapa persen dari yang di usulkan, dan Quota keterlibatan atau partisipasi masyarakat di kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur kelurahan hanya beberapa persen. Dari uraian latar belakang tersebut Penulis tertarik untuk menganalisa dan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai judul “Efektivitas Pelaksanaan Musrenbang di Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur Kota Palu”.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, cukup banyak yang harus direview kembali oleh Penulis dalam kegiatan Musrenbang tingkat Kelurahan, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu ”Bagaimana efektivitas pelaksanaan Musrenbang Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur Kota Palu ?”

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam usulan penelitian ini adalah kualitatif. Menurut John W. Creswell (1988) dalam Hamid Patilima (2007:2) mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia, berdasarkan pada penciptaan gambar holistic yang dibentuk kata – kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci dan disusun dalam sebuah

latar ilmiah. Untuk meneliti Efektivitas Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur Kota Palu, di mana Penulis dapat membangun abstrak, konsep, proposisi dan teori.

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu di Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah. Teknik Pengambilan Informan dalam penelitian ini, yaitu teknik “sampling purposive (*non probability sampling*)” yaitu semua anggotanya atau subyek penelitian tidak memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai informan” Sevilla, et.al. (1999: 168). Adapun jumlah informan dalam penelitian ini yaitu berjumlah 7 orang. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data Primer merupakan data yang diperoleh dari lapangan dengan cara mewawancarai informan yaitu, para pihak yang terkait dalam musrenbang kelurahan Besusu Tengah terdiri dari, unsur pihak dari Bappeda, pihak dari aparat kelurahan, tokoh masyarakat serta masyarakat kelurahan Besusu Tengah khususnya. Sedangkan Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi pustaka dan sumber – sumber lain yang mendukung dari data primer.

Teknik pengambilan dan pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Proses pengolahan data merupakan tindak lanjut setelah melakukan pengumpulan data. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan dalam proses pengolahan data yaitu bergerak diantara perolehan data, reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Tahap pengolahan data diawali dari kegiatan dengan menggunakan Model Analisis Interaktif sebagai berikut (Miles dan Huberman dalam Faisal, 1990:98): yaitu Editing Data, Pengelompokan Data, Penafsiran Makna Data serta Kesimpulan dan Saran.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelurahan Besusu Tengah adalah merupakan salah satu kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Palu Timur, serta merupakan Kelurahan perkotaan yang memiliki letak yang sangat Strategis, hanya 1 Km jarak tempuh dari Ibu Kota, dan memiliki Luas Wilayah pemukiman 14,035 Ha/m2. Kelurahan Besusu Tengah merupakan salah satu Kelurahan dari empat kelurahan yang masuk dalam wilayah Kecamatan Palu Timur. Kelurahan Besusu Tengah terletak pada ketinggian antara 0-5 meter yang terbagi atas Tiga (3) Rukun warga (RW) dan Empat Belas (14) Rukun Tetangga (RT).

Dalam menjalankan roda pemerintahannya Kelurahan Besusu Tengah menjalankannya sesuai dengan Visi dan Misi, demi melaksanakan visi dan misi tersebut dengan tujuan agar terciptanya tata pemerintahan yang baik bagi masyarakat, adapun Visi dan Misi tersebut yaitu sebagai berikut: Visi

Pembangunan masyarakat Besusu Tengah yang sejahtera dan mandiri. Demi mendukung Visi tersebut di atas, maka perlu melaksanakan beberapa Misi, antara lain sebagai berikut: a) Peningkatan sumber daya manusia, b) Menciptakan lapangan kerja dan c) Peningkatan kapasitas pengembangan masyarakat.

Berdasarkan dari hasil observasi dan data – data primer yang terkumpul, secara umum pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di tingkat Kelurahan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kelurahan memberitahukan kepada Kepala RW dan RT tentang akan diadakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan, diharapkan masing – masing Ketua RT dan RW mengusulkan kegiatan sesuai dengan kebutuhan di masing – masing wilayahnya.
2. Masing – masing RT mengadakan rapat warga tentang usulan kegiatan yang akan diajukan, dan dikoordinir oleh Ketua RW,

kegiatan disusun berdasarkan skala prioritas di masing – masing RT.

3. Sesuai dengan jadwal masing – masing Kelurahan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan dilaksanakan dengan dihadiri oleh Ketua RT/RW, Lembaga Pemberdayaan masyarakat (LPM), Kelompok – kelompok masyarakat (Pemuda, Wanita, Organisasi Masyarakat, Pengusaha, Kelomok tani dll.
4. Dari proses Musrenbang Kelurahan tersebut kemudian dihasilkan:
  - a. Daftar prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan sendiri oleh Kelurahan.
  - b. Daftar kegiatan yang akan dilaksanakan melalui Alokasi Dana Kelurahan, secara swadaya maupun melalui pendanaan lainnya.
  - c. Daftar prioritas kegiatan yang akan diusulkan ke kecamatan untuk dibiayai melalui APBD Kota dan APBD Propinsi.
  - d. Daftar nama anggota delegasi yang akan membahas hasil Musrenbang Kelurahan pada Musrenbang Kecamatan.

Sehubungan hal tersebut di atas, di lokasi penelitian usulan – usulan dari tingkat RT yang diakomodir di tingkat RW hanya menghasilkan usulan – usulan yang belum mempunyai arahan dan hanya berkesan sebagai pelengkap administrasi saja, yaitu:

1. Belum jelasnya kegiatan yang akan dilaksanakan baik di tingkat RT/RW.
2. Belum diketahui jumlah dan beban biaya yang akan dipakai apakah swadaya, desa atau biaya dari tingkat Kecamatan/Kota.
3. Usulan dari tingkatan RT sebelum masuk dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan merupakan keputusan RW yang skala prioritasnya sangat tergantung dari pihak RW.
4. Proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan belum menampung aspirasi masyarakat secara keseluruhan, sehingga rencana kegiatan

yang dihasilkan kurang memberdayakan usulan di tingkat RT.

Sehingga untuk lebih mendekatkan perencanaan ke aspirasi masyarakat, salah satu usaha yang harus ditempuh adalah memberikan kejelasan tentang program-program yang hendak dilaksanakan, sehingga masyarakat benar – benar mengerti apa yang hendak dilaksanakan, besaran dana yang akan digunakan dan sumber pembiayaan yang akan digunakan, dan untuk hal tersebut perlu adanya perubahan terhadap mekanisme yang ada pada proses Musrenbangkel.

### **1. Pencapaian Tujuan**

Proses Pencapaian Tujuan merupakan suatu kegiatan yang memiliki tujuan dengan menggunakan perencanaan, pengarah, pengorganisasian dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisasi, dan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Musrenbang tingkat Kelurahan Besusu Tengah adalah forum musyawarah antar para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah – langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Kelurahan Besusu Tengah yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah Kota Palu, di wilayah Kecamatan Palu Timur, yang dikoordinasikan oleh Bappeda Kota Palu dan dilaksanakan oleh Camat Palu Timur.

Agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin diperlukan tahapan, baik dalam arti tahapan pencapaian bagian – bagiannya (dalam hal ini program – program yang diprioritaskan bagi masyarakat umum) maupun tahapan dalam arti periodisasinya (dalam hal ini program kegiatan yang peruntukannya dapat digunakan dalam jangka waktu tertentu). Dengan kata lain perlu ditetapkan sasaran – sasaran , sering dikenal dengan istilah “tujuan antara” yang ingin

dicapai pada satu kurun waktu tertentu. Karena sasaran merupakan tujuan antara, maka ciri – cirinya pun agak berbeda dengan ciri – ciri tujuan akhir, yaitu :

- a. Kurun waktu pencapaiannya ditentukan, seperti misalnya lima tahun.
- b. Tidak lagi idealistis melainkan didasarkan pada pemikiran pragmatisme dalam arti bahwa sasaran tersebut diyakini memang mungkin dicapai.
- c. Dinyatakan secara kuantitatif sepanjang hal itu mungkin dilakukan.
- d. Sasaran merupakan “target” yang kongkrit.

Untuk mengetahui, menggali, dan mengumpulkan informasi yang bersifat lokal dalam musrenbang di Kelurahan Besusu Tengah sudah di mulai dari tingkat RT dan RW. Masalah – masalah dikumpulkan sebanyak mungkin kemudian di seleksi sehingga dihasilkan masalah yang memang benar – benar harus segera ditangani di tingkat RT/RW. Hasil seleksi ditingkat RT/RW tersebut di usulkan dalam Murenbang Kelurahan.

Dalam Musrenbang Kelurahan semua masalah – masalah yang diajukan oleh RT/RW kemudian diseleksi di tingkat Kelurahan Selanjutnya menghasilkan Daftar Usulan Skala Prioritas Tahun 2014 Musrenbang Kelurahan. Berkaitan dengan proses untuk mengetahui, menggali, dan mengumpulkan informasi yang bersifat lokal dalam perencanaan musrenbang dengan melihat suatu proses perencanaan sama dengan tahap pengumpulan data atau informasi. Hal senada oleh pendapat Bendavid-val (dalam Kuncoro, 2004:49-50) Pengumpulan data bukan merupakan suatu tahap dalam proses perencanaan secara keseluruhan, tetapi secara terus menerus berfungsi mendukung dan menyediakan informasi pada setiap tahap perencanaan, Bendavid-val menambahkan bahwa beberapa hasil utama pengumpulan data dan analisis data adalah mencakup evaluasi siklus perencanaan sebelumnya dan kinerja dari

proyek – proyek pembangunan sebelumnya yang dilakukan di daerah tersebut.

Hal senada juga disampaikan oleh menurut Randy R. Wrihatnolo dan Riant Nugoroho D (2006:42-43) menjelaskan unsur – unsur pokok dan siklus dalam perencanaan pembangunan salah satunya adalah pengumpulan informasi untuk perencanaan (input untuk analisis dan perumusan kebijaksanaan). Dalam pengumpulan data dalam musrenbang di Kelurahan Besusu Tengah dimulai dari tingkat RT dan RW. Pengumpulan data berlangsung terus menerus sampai dengan Musrenbang Kelurahan. Untuk memperoleh data yang benar dengan melibatkan masyarakat secara langsung dan tim perumus juga melakukan cek ke lapangan. Dalam kegiatan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan juga di paparkan kinerja dari kegiatan – kegiatan ditahun sebelumnya.

Dengan melihat beberapa hasil wawancara di lapangan, dalam pencapaian tujuan dari pelaksanaan Musrenbang Kelurahan Besusu Tengah, dapat dikatakan berhasil dilaksanakan. Hanya saja dalam proses pelaksanaannya ada beberapa hal yang perlu dikaji kembali oleh pihak – pihak yang terlibat dalam penyelenggaraannya. Maka perlu adanya kejelasan dalam penyelenggaraan Musrenbang, baik ditingkat Kelurahan, Kecamatan, dan Kota seperti dalam penyelenggaraan perlu ditekankan apa yang harus dibuat dalam pelaksanaannya, kalau untuk program infrastruktur baik jalan ataupun drainase perlu adanya kejelasan dari pihak atas. Jika saja, program tersebut perlu melalui beberapa tahapan – tahapan dalam pekerjaannya serta tidak dilaksanakan sekaligus di semua wilayah maka harus ada kejelasan untuk kedepannya.

Oleh sebab itu, penulis menyimpulkan bahwa dalam pencapaian tujuan yang sebenarnya dalam efektivitas musrenbang Kelurahan Besusu Tengah dapat dikategorikan kurang baik dalam pelaksanaannya. Dengan alasannya sebagaimana informasi yang didapatkan

bahwa beberapa usulan kurang dapat diakomodir.

## 2. Integrasi

Integrasi adalah proses di mana komponen yang berbeda bergabung menjadi satu. Intisari pemikiran Integrasi musrenbang adalah ikatan sistemik yang berhubungan secara timbal balik sebagai praktek teratur berdasarkan kondisi otonomi relatif dan ketergantungan relatif antara sistem perencanaan partisipatif dalam program – program Pemberdayaan yang bersifat *ad hoc* dengan sistem perencanaan partisipatif dalam Musrenbang. Oleh karena itu, maka dilaksanakanlah Integrasi Musrenbang sebagai alat untuk mendorong optimalisasi pengintegrasian sistem pembangunan reguler dengan program – program yang akan dilaksanakan secara *ad hoc*.

Tahap lanjut dari hasil pengumpulan data informasi mengenai program kegiatan di Kelurahan yang dikumpulkan dan diolah sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang lebih lengkap, utuh dan mendalam mengenai program musrenbang di Kelurahan Besusu Tengah. Untuk mencapai hal tersebut, pada dasarnya dilakukan suatu proses analisis atas informasi, data dan pengalaman hidup masyarakat. Proses analisis sendiri bermakna sebagai tindakan untuk menemukan kaitan antara satu fakta dengan fakta yang lain. Apa yang dirumuskan harus sederhana, jelas dan kongkrit. Serta menyatukan beberapa pemikiran sebelumnya yang telah dibahas dalam forum akan program kegiatan yang dijadikan prioritas dalam pelaksanaan musrenbang kelurahan di besusu tengah.

Agar integritas dapat mencerminkan kebutuhan dari komunitas (masyarakat), tidak ada cara lain kecuali melibatkan masyarakat dalam proses tersebut. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengusahakan agar masukan data yang dihimpun benar – benar merupakan apa yang dirasakan dan apa yang menjadi keprihatinan dari masyarakat. Dalam hal ini, tidak semua apa yang disampaikan

masyarakat harus diterima, justru pada saat itulah momentum untuk bersama – sama masyarakat memilah – milah mana segi – segi yang merupakan kebutuhan dan mana yang sekedar keinginan. Suatu keinginan tentu saja memiliki kadar subjektifitas yang tinggi, dan cenderung tanpa batas yang jelas. Oleh sebab itu, yang hendak menjadi prioritas adalah menjawab kebutuhan – kebutuhan dasar dari masyarakat.

Proses integrasi dilakukan dengan membagi peserta kedalam kelompok pembahasan berdasarkan jumlah fungsi peserta atau gabungan peserta yang tercantum, tetapi dikarenakan jumlah peserta yang terlalu banyak dan dipandang tidak efektif maka sesuai kesepakatan forum maka ditunjuk 5 orang untuk menjadi tim perumus sekaligus menjadi wakil Kelurahan dalam musrenbang Kelurahan. Selanjutnya tim perumus bertugas untuk menyusun usulan daftar skala prioritas kegiatan tahun 2014 tugas lain memastikan semua prioritas kegiatan yang diusulkan oleh kelurahan sudah tercantum menurut masing – masing Kelurahan.

Dengan dilibatkannya masyarakat dalam proses integrasi musrenbang dalam perencanaan partisipatif di Kelurahan Besusu Tengah, menyangkut penyatuan beberapa usulan yang ada yang kemudian dijadikan prioritas utama dalam program ke depannya. Senada disampaikan oleh Wicaksono dan Sugiarto (dalam Wijaya, 2001:25), lebih lanjut mengemukakan beberapa ciri – ciri perencanaan partisipatif sebagai berikut : “Terfokus pada kepentingan masyarakat (1) Perencanaan program berdasarkan pada masalah dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat; (2) Perencanaan disiapkan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang memenuhi sikap saling percaya dan terbuka”. Kemudian hampir sama dengan apa yang dikatakan Samsura (2003:2) menjelaskan kriteria – kriteria dari perencanaan partisipatif sebagai berikut:

1. Adanya pelibatan seluruh stakeholder.
2. Adanya upaya pembangunan institusi masyarakat yang kuat dan legitimate.
3. Adanya proses politik melalui upaya negoisasi atau urun rembuk yang pada akhirnya mengarah pada pembentukan kesepakatan bersama (*collective agreement*).
4. Adanya usaha pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pembelajaran kolektif yang merupakan bagi dari proses demokratisasi.

Hal senada juga disampaikan oleh Bendavid-val (dalam Kuncoro, 2004;49-50) Sistem Informasi perencanaan, sebagai hasil utama dari pengumpulan dan analisis data, seyogyanya mencakup 5 bidang utama :

1. Evaluasi siklus perencananaan sebelumnya.
2. Kinerja dari proyek – proyek pembangunan sebelumnya yang dilakukan di daerah tersebut.
3. Penaksiran sumber – sumber daya pembangunan di luar daerah, tetapi tersedia dan potensial untuk tersedia (dana publik atau swasta yang dapat diinvestasikan pada bidang yang diinginkan oleh pembangunan ekonomi daerah, bakat – bakat khusus atau kapabilitas individual dan lembaga – lembaga yang dapat ditarik dsb).
4. Karakteristik dan dinamika kondisi daerah.
5. Perekonomian, infrastruktur, karakterisitik fisik dan sosial, sumber daya, dan institusi, dsb.
6. Keterkaitan antara kondisi daerah dengan daerah – daerah lainnya.

Perencanaan partisipatif di Kelurahan Besusu Tengah sudah terjadi dialog secara langsung antara masyarakat dengan Pemerintah Kelurahan Besusu Tengah dalam Musrenbang Kelurahan Besusu Tengah, walaupun menurut teori transaktif dialog terjadi antara Masyarakat dengan Perencana (fasilitator) dalam hal ini perencana sebagai mediator antara masyarakat dan Pemerintah sehingga akan memunculkan kesepakatan

pemabangunan antara masyarakat dan pemerintah Kelurahan Besusu Tengah, tapi setidaknya dalam musrenbang Kelurahan Besusu Tengah masyarakat diajak untuk menggali, mengetahui, dan mengumpulkan informasi masalah – masalah yang ada disekitarnya. Kemudian masalah tersebut di seleksi atau dirumuskan serta dintegrasikan (menggabungkan) program – program sehingga dihasilkan porgram prioritas yang memang benar – benar harus segera ditangani. Bahwa berdasarkan analisis data dan dengan membandingkan dengan teori yang digunakan tahap Perumusan atau identifikasi masalah dalam proses perencanaan partisipatif di Kelurahan Besusu Tengah dapat diketahui :

1. Dengan dilibatkannya masyarakat Kelurahan Besusu Tengah mengetahui, menggali, dan mengumpulkan informasi serta mengenali secara seksama masalah – masalah yang bersifat lokal memberikan dampak positif bahwa masalah yang diusulkan musrenbang terhadap proses pelaksanaannya musrenbang Kelurahan Besusu Tengah memang benar – benar apa yang dirasakan masyarakat.
2. Data berupa masalah – masalah yang ada di masyarakat oleh tim perumus musrenbang diolah hingga diperoleh gambaran yang lebih lengkap, utuh dan mendalam serta dapat diintegrasikan menjadi satu kesatuan prioritas program.
3. Perumusan atau identifikasi masalah dalam Perencanaan partisipatif di Kelurahan Besusu Tengah disusun berdasarkan masalah yang benar – benar mendesak dan memang membutuhkan pemecahan secepatnya karena menyangkut kepentingan banyak orang.
4. Perumusan sampai pada penyatuan program yang akan diprioritaskan musrenbang di Kelurahan Besusu Tengah sudah melibatkan semua unsur stakeholder yang ada di Kelurahan Besusu Tengah.



### 3. Adaptasi

Adaptasi dalam musrenbang yang dimaksud yaitu kemampuan pemerintah kelurahan Besusu Tengah dalam menyelenggarakan Musrenbang Kelurahan untuk menyesuaikan dengan tahapan – tahapan sesuai dengan Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pelaksanaan musrenbang dan pengisian tenaga kerja dalam hal ini semua yang berkepentingan khususnya masyarakat ikut terlibat di dalamnya.

Pemahaman mengenai kemampuan daya dukung ini diperlukan agar rencana kerja yang disusun tidak bersifat asal – asalan, tetapi benar – benar merupakan hasil musyawarah yang telah ditetapkan secara skala prioritas. Proses kemampuan daya dukung dalam proses musrenbang di Kelurahan Besusu Tengah dengan adanya musrenbang kelurahan yang dihadiri oleh seluruh masyarakat dan adanya kesepakatan prioritas kegiatan sudah merupakan daya dukung dari masyarakat.

Dari pendapat narasumber tersebut bahwa daya dukung konkrit dan nyata adalah berupa uang bersumber pemerintah baik pemerintah daerah kota, provinsi atau, kemudian daya dukung yang dapat diusahakan dengan melalui swadana masyarakat yang berupa uang, tenaga dsb. Hal senada juga disampaikan oleh Bendavidval (dalam Kuncoro, 2004:49-50), Sistem Informasi perencanaan, Penaksiran sumber – sumber daya pembangunan di luar daerah, tetapi tersedia dan potensial untuk tersedia (dana publik atau swasta yang dapat diinvestasikan pada bidang yang diinginkan oleh pembangunan ekonomi daerah, bakat – bakat khusus atau kapabilitas individual dan lembaga – lembaga yang dapat ditarik dsb). Kemudian Bratakusumah (2004:37) menjelaskan hal sama :

*Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan*

*perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah dan lingkungannya dalam wilayah/daerah tertentu, dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada, dan harus memiliki orientasi yang berdifat menyeluruh, lengkap, tapi tetap berpegang teguh pada azas skala prioritas.*

Dari definisi tersebut di atas, dapat diketahui bahwa proses perencanaan dalam pencapaian tujuannya dengan pemanfaatan sumber-sumber pembangunan (termasuk sumber-sumber ekonomi) yang terbatas adanya, untuk mencapai tujuan-tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efisien dan efektif. Kemudian berdasarkan dari penulisan dokumentasi yang berupa Usulan Daftar skala prioritas kegiatan tahun 2014 dari data tersebut dijelaskan bahwa sumber dana setiap kegiatan dari dana Kota sudah tertulis tetapi dari provinsi, pusat dan swadaya masih kosong.

Berdasarkan analisis data dan dengan membandingkan teori yang digunakan tahap identifikasi dukungan dalam proses perencanaan partisipatif di kelurahan Besusu Tengah dapat diketahui :

1. Dukungan yang konkrit dan nyata adalah dengan keikutsertaan seluruh masyarakat dalam proses musrenbang kelurahan dan kecamatan yang kemudian menghasilkan kesepakatan daftar prioritas kegiatan tahun 2014.
2. Dukungan yang konkrit dan nyata berupa uang dan sumber daya lain tidak ada karena hasil dari musrenbang sifatnya usulan saja.
3. Daya dukung yang merupakan potensi (akan ada atau bisa diusahakan) juga tidak ada karena dukungan ini muncul kalau ada dukungan yang berupa dukungan konkrit dan nyata sudah ada dahulu.

Jadi, dari ketiga aspek yang Penulis jadikan sebagai tolak ukur dalam efektivitas pelaksanaan Musrenbang Kelurahan Besusu Tengah, bahwa dalam pencapaian tujuan

masih kurang baik, di mana beberapa usulan-usulan yang ditelaah disampaikan kurang diakomodir. Pada aspek Integrasi, beberapa usulan yang ada bisa dintegrasikan atau dapat disatukan yang kemudian dipilih salah satu dari beberapa usulan diprioritaskan, meski usulan yang lainnya perlu dilaksanakan secara bertahap. Kemudian pada aspek, adaptasi dalam hal ini kemampuan dalam menyelenggarakan musrenbang cukup baik dengan harus melalui beberapa tahapan-tahapan yang dengan banyaknya usulan-usulan didalam penyelenggaraan musrenbang Kelurahan Besusu Tengah, yang pada akhirnya bisa dilaksanakan.

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan efektifitas pelaksanaan Musrenbang Kelurahan Besusu Tengah, dapat Penulis simpulkan bahwa dalam pelaksanaannya dikategorikan cukup baik, dengan melihat dari tiga aspek yang dijadikan tolak ukur, yang meliputi : pencapaian tujuan, bahwa dalam pencapaian tujuan terdapat beberapa usulan – usulan yang kurang diakomodir, sehingga dalam proses pelaksanaan musrenbang dikatakan kurang baik menuju pencapaian tujuan musrenbang itu sendiri. Aspek integrasi, bahwa dari banyaknya usulan – usulan yang ada dapat disatukan dari beberapa usulan – usulan yang ada, dan menjadi salah satu program yang diprioritaskan sehingga dalam hal ini dikatakan cukup baik. Dan pada aspek adaptasi, dapat disimpulkan bahwa kemampuan daya dukung dapat bersumber dari pemerintah pusat, kota, provinsi atau, dapat diusahakan dengan melalui swadaya masyarakat yang berupa uang, tenaga dsb. Sehingga dalam pelaksanaannya dapat terealisasi dengan baik.

### **Rekomendasi**

Saran dari penulis yang perlu dibenahi dalam pelaksanaan Musrenbang Kelurahan Besusu Tengah, yaitu sebagai berikut:

- a. Perlunya pembenahan pada aspek pencapaian tujuan dalam Musrenbang Kelurahan, dengan lebih melihat, mengidentifikasi secara detail, mana program yang harus dikategorikan sebagai suatu prioritas secara umum dapat dimanfaatkan bagi semua masyarakat Kelurahan Besusu Tengah. Sehingga dalam pelaksanaan Musrenbang Kelurahan dapat berjalan dengan efektif. Maka perlunya aspek akuntabilitas dan efektivitas biaya dalam musrenbang serta mampu membina kemampuan para pihak yang terlibat dalam musrenbang khususnya pada tingkat aparatur kelurahan.
- b. Dengan adanya, penelitian ini dalam skala Kelurahan, bagi pihak-pihak yang terkait perlu melakukan review atau observasi secara langsung terlebih dahulu demi membuat keefektifan masyarakat di dalam Musrebang Kelurahan.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Selanjutnya penulis menyadari bahwa keberhasilan penyusunan jurnal ini dan penyelesaian studi pada Program Magister Administrasi Publik adalah berkat motivasi dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua Ayahanda dan Ibunda tercinta Hi. Nontji dan Hj. Arawiyah serta Suami tercinta Hi. Muhammad Nur, anak-anaku Nurul Ikhlas dan Ananda Pratiwi dengan penuh kasih sayang memberikan dorongan dan terima kasih pula khususnya kepada pembimbing Dr. Nawawi Natsir, M.Si dan Dr. Intam Kurnia, M.Si. yang selalu memberikan masukan serta penuh kesabaran telah mencurahkan segenap waktu dan pikiran dalam membimbing dan

mengarahkan penulis agar dapat menyelesaikan penelitian ini sebagaimana mestinya. Semoga Allah SWT. Selalu mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada beliau berdua.

#### DAFTAR RUJUKAN

Faisal, Sanafiah. 1990. *Penelitian Kualitatif: Dasar – dasar dan Aplikasi*. YA3: Malang.

Kuncoro, Mudrajat. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Erlangga: Jakarta.

Patilima, Hamid. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta: Bandung.

Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah. 2004. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.

Sevilla, C.G. 1999. *Pengantar Metode Riset*, Penerjemah: Alimuddin Tuwu. Universitas Indonesia: Jakarta.

Sudriamunawar, Haryono. 2002. *Pengantar Studi Administrasi Pembangunan*. Mandar Maju: Bandung.

Wrihatnolo, Randy R & Dwijowijoto, Riant N. 2007. *Manajemen pemberdayaan*. PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia: Jakarta.